PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN SECARA ILEGAL DI KABUPATEN MUKOMUKO

Yoga Adika Putra^{a1}, Mikho Ardinata^{b2}, Sinung Mufti Hangabei^{c3}, Hendi Sastra Putra^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

A B S T R A K

Keywords:
Illegal, Pidana,
Pertambangan

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, menuntut rakyat Indonesia agar berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola dan memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan Negara Indonesia. Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Pertambangan mencakup beberapa kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan dan penambangan mineral dan batubara, termasuk eksplorasi umum, penambangan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Namun, dalam praktik pertambangan, tidak semua pihak mematuhi persyaratan perizinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Penelitian tentang penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Kabupaten Mukomuko bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Secara Ilegal Di Kabupaten Mukomuko. 2) Untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Secara Ilegal Di Kabupaten Mukomuko. Data terkait penelitian ini telah didapatkan melalui teknik wawancara dan studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu 1) Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal di Mukomuko. Pihak Kepolisian Polda Bengkulu telah melakukan tiga tahapan proses penanganan. Ketiga tahapan proses penanganan tindak pidana penambangan ilegal tersebut adalah tahapan sosialisasi, tahapan pencegahan serta tahapan penindakan. 2) Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan ilegal adalah Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu di kantor Kepolisian Resort Mukomuko, oknum kepolisian yang bekerja sama, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan setempat.

ABSTRACT

Keywords :
Illegal,
Criminal,
Mining

Source Power The nature that Indonesia has , requires the Indonesian people to make efforts maximum Possible in manage and utilize matter it is for welfare man That itself and the State of Indonesia. There is confirmation the reflect importance every management or business only can done with exists permission from the state (government). Mining covers a number of activity Which related with exploration , management and mining of minerals and coal , including exploration general , mining , studies feasibility , construction , mining , management and refining , transportation and sales , However , in practice mining , no all party obey condition licensing as regulated in Constitution . Study about enforcement law to mining illegal in the District Mukomuko aim for : 1) For know Law Enforcement Against Act Criminal Mining By Illegal In Regency Mukomuko . 2) For know obstacle in Law Enforcement Against Act Criminal Mining By Illegal In Regency Mukomuko . Related data study This has obtained through technique interviews and studies document For gather secondary data related with problems that will researched . Data obtained both primary data and secondary data grouped and arranged in a way systematic . Next is the data analyzed in a way qualitative For makes it easier in interesting conclusion . Results obtained from study which has done namely 1) In case implementation enforcement law to activity mining illegal in Mukomuko . Party The Bengkulu Regional Police have do three stages of the handling process . Third stages of the handling process follow criminal mining illegal the is stages socialization , stages prevention as well as stages enforcement . 2) Obstacles faced by enforcers law in handle follow criminal mining illegal is Quantity and quality member investigator in each unit that has not adequate , especially in follow-up units criminal particular in the office Mukomuko Resort Police , individual working police force same , factor facilities and infrastructure , factors public as well as factor culture local .

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan memiliki luas daratan sekitar 2 juta km² serta wilayah yang membentang sepanjang ekuator dari 95 BT hingga 141 BT (sekitar 5000 km) dan 6 LU hingga 11 LS tentu menggambarkan seberapa luas wilayah Negara Indonesia ini. Dengan luas wilayah yang sangat besar ini tentu pula berbanding lurus dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maupun di permukaannya baik yang dapat di perbaharui (renewable) maupun yang tidak dapat di perbaharui (unrenewable).

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah terdapatnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi aset tidak tergantikan bagi Bangsa Indonesia oleh karenanya penguasaannya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu, penegasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan sumber daya alam SDA adalah bentuk dari perbuatan orang dalam pengelolaan sumber daya, dan kekayaan bumi dengan meliputi air, udara, tanah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk digunakan sebagai kemakmuran rakyat. Terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka dilaksanakannya berbagai macam kegiatan untuk kemajuan pembangunan. Kegiatan usaha pertambangan untuk pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan.¹ Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi perak, emas, minyak, tembaga, gas bumi, dan batubara.

Pertambangan mencakup beberapa kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan dan penambangan mineral dan batubara, termasuk eksplorasi umum, penambangan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Tambang mempunyai peranan strategis dan memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan daerah. Keberadaan sumberda tambang yang memiliki potensi ekonomi perlu dilakukan pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Mineral dan batubara yang terdapat di wilayah pertambangan di Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan mencapai kekayaan serta kemakmuran dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, maka

¹ Muhammad Agus Fajar Syaefudin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Illegal*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1 | Mei 2020, hlm. 109.

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

² Junaid, *Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan*, Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 11. No.1, Januari – April 2022, hlm. 61

pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat.³

Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas penting yang menunjang hajat hidup orang banyak. Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan untuk dimasukkan Ini termasuk penelitian umum. Eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴

Salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah mineral (pertambangan). Sektor pertambangan merupakan sumber daya alam dan mempunyai peranan penting dalam menunjang hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus dikuasai oleh negara agar dapat menciptakan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional sehingga tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan nasional secara berkeadilan. Perizinan merupakan sarana pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan lingkungan hidup untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan.

Masyarakat saat ini merasakan ada perlakuan yang berbeda, ada pemberian kebebasan bagi kelompok tertentu dikarenakan penambangan yang dilakukan oleh kelompok atau orang tertentu yang manfaatnya hanya dinikmati langsung oleh si penambang sementara dampak dari akibat penambangan tidak lagi pada si pengelola tapi masyarakat sekitar lokasi yang akan menerima dampak buruk yang mengakibatkan dampak buruk di sekitar lokasi, belum lagi aktivitas bongkar muat dari lokasi tambang ke tempat tujuan yang juga menimbulkan polusi ebu yang tidak dipikirkan oleh si penambang, yang penting bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya, hal ini terjadi tentu disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, bahkan boleh jadi masyarakat memang tidak tau sanksi akibat penambangan tanpa izin, namun ini tidak menjadi alasan bagi penegak hukum untuk tidak menindak tegas penambang liar karena semua manusia dipandang sama hak, harkat dan martabatnya di mata hukum (equality before the law). Seseorang tidak bisa berdalih tidak mengetahui suatu undang-undang Ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum (Ignorante juris non excusat) ini berarti si penambang tanpa izin tidak bisa lolos dari sanksi karena ketidaktahuan atas hukum, atau dengan kata lain tidak ada kata maaf bagi penambang yang melakukan penambangan tanpa izin.

UU Nomor 3 Tahun 2020 sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Menurut undang-undang tersebut, penambangan batuan gunung termasuk dalam kelompok kelima atau kelompok batuan, dan pengelolaannya memerlukan izin usaha pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah. Sekalipun diatur dalam undang-undang, praktik penambangan tidak sah yang disebut penambangan rakyat masih mungkin terjadi. Penambangan rakyat sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, sejak manusia pertama kali sadar akan pemanfaatan mineral. Disebut penambangan rakyat karena dilakukan dalam bentuk yang sederhana dari segi pola pikir, pengetahuan, dan peralatan yang digunakan. Kegiatan pertambangan masyarakat secara historis merupakan warisan nenek moyang dan dikenal hingga saat ini. Sebab, hampir seluruh pertambangan di Indonesia, khususnya mineral, logam, dan batu mulia lainnya bermula dari kegiatan pertambangan rakyat, baik yang masih aktif maupun tidak.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

³ Muhammad Agus Fajar Syaefudin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1 | Mei 2020, hlm. 109.

⁴ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Batubara mengatur: Barangsiapa melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (Rp100 miliar). Namun, dalam praktik pertambangan, tidak semua pihak mematuhi persyaratan perizinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Beberapa kasus telah sampai ke pengadilan dan telah memperoleh putusan, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm. Pasal 158 menyatakan: "Setiap individu yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 dapat dikenai hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Dalam pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang menentukan pelaku pertambangan tanpa izin, yakni: 1) Unsur setiap orang, merujuk pada individu yang melakukan pertambangan tanpa izin, dan 2) Unsur pertambangan tanpa izin, menunjukkan pelanggaran terhadap pasal 35 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pertambangan tanpa izin dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan pasal 158 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam konteks ini, kegiatan pertambangan tanpa izin juga dihubungkan dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan bencana alam.

Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan ilegal oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, serta minimnya pembinaan dan pengawasan. Kasus konkret, seperti putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Mkm, menunjukkan bahwa hukuman diberikan kepada pelaku pertambangan tanpa izin, tetapi masih terdapat ketidakpatuhan dan kurangnya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Bengkulu.

Berdasarkan konteks di atas, peneliti bertujuan untuk mengkaji kasus tertentu dalam sebuah penelitian skripsi, Dalam penelitian ini, penulis akan menyelidiki dan menganalisis aspek-aspek penegakan hukum terkait dengan kegiatan pertambangan ilegal di wilayah tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam kasus yang dibahas. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian berjudul dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Kabupaten Mukomuko."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan hukum empiris berfokus pada pengamatan dan analisis fenomena hukum yang ada dalam masyarakat dengan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam dan penekanan pada interpretasi naratif. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Bengkulu terkait kasus pertambangan illegal di Kabupaten Mukomuko dengan teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil temuan penelitian melalui wawancara terhadap informan penelitian, untuk selanjutnya dilakukan analisis secara deduktif untuk menginterpretasikan data secara narasi.

PEMBAHASAN

Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Secara Ilegal di Kabupaten Mukomuko

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Oleh karenanya menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dalam rangka penegakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penambangan timah ilegal, dalam hal ini Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak Kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap penambangan timah ilegal, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Setelah melakukan razia, pihak kepolisian melakukan penyelidikan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba.

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁵ Agar tidak terjadi suatu tindak pidana maka ada beberapa peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati. Dalam undang-undang pertambangan selain mengenal adanya Tindak pidana Ilegal Mining, juga terdapat Bentuk-bentuk tindak pidana penambangan tanpa izin yang ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin yaitu:

1. Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
2. Tindak Pidana Menyampaikan data Laporan Keterangan Palsu. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00.
3. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang dalam Kawasan hutan. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap yang dilakukan dalam Kawasan hutan baik hutan lindung dan hutan produksi dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke tempat penjual hasil tambang/pabrik merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining loundring)

⁵ Bedah Hukum , *Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, <https://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022.

dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.000,-.

4. Tindak Pidana Tidak Melakukan Reklamasi dan Pasca Tambang. Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari kewajibannya ini. Pasal 161 B ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum sebagaimana tugasnya dalam rangka untuk menegakan suatu aturan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum oleh para penegak hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi setiap aturan yang berlaku. mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tak hanya pidana penjara maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya.

Maraknya kegiatan penambangan ilegal atau tanpa izin di Mukomuko, hal ini tentunya disebabkan atau didorong oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut menjadi penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal atau tanpa izin sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu hal yang paling sering menjadi pemicu timbulnya pelanggaran/kejahatan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya kegiatan penambangan ilegal/tanpa izin di Mukomuko adalah faktor ekonomi. Adanya kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan dari masyarakat. Sudah sangat jelas bahwasanya faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama masyarakat melakukan kegiatan penambangan.

2. Kegiatan penambanga meupakan kegiatan turun menurun

Salah satu faktor maraknya penambangan tersebut dalah para pelaku menganggap kegiatan penambangan merupakan kegiatan turun temurun dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan Penambangan tersebut sudah sejak dulu ada. yang dimana masyarakat banyak menganggap kegiatan penambangan adalah kegiatan turun temurun sejak tahun 1970 dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini, dengan ini sudah jelas bahwa faktor kegiatan penambangan ilegal tersebut adalah kegiatan turun menurun.

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab maraknya penambangan ilegal lah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selama berjalannya kegiatan penambangan di mukomuko belum ada pihak dari pemerintah yang melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan an juga tidak terdapat satupun papan pamflet himbauan yang berisikan ketentuan serta aturan tentang penambangan. Terdapat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah yang dimana tidak pernah datangnya pihak dari pemerintah untuk melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap kegiatan penambangan.

4. Tidak adanya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan

Salah satu faktor maraknya kegiatan penambangan ilegal di Mukomuko ialah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait mengenai peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan ini di atur didalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dijelaskan didalam pasal 35.

5. Permintaan Kebutuhan

Adapun yang menjadi faktor maraknya kegiatan penambangan ilegal tersebut adalah dapun yang menjadi faktor maraknya kegiatan penambangan. Dari pernyataan diatas

sudah jelas bahwasanya dikarenakan kualitas dari material yang dihasilkan oleh penambang. Branding yang dimaksud disini adalah material hasil penambangannya dikenal dan diakui memiliki kualitas yang baik sehingga tidak sedikit konsumen yang mencarinya untuk digunakan sebagai material.

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Secara Ilegal di Kabupaten Mukomuko

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mukomuko mengalami kemajuan, sebab dari 9 (Sembilan) kasus pertambangan tanpa izin di tahun 2020 menyusut menjadi 7 (tujuh) kasus di tahun 2022. Namun hal ini bukan berarti sudah tidak ada kasus pertambangan batuan tanpa izin lagi, kegiatan penambangan masih marak di berbagai kawasan di Kabupaten Mukomuko. Tetapi pihak Kepolisian hanya menangani apabila ada yang melaporkan kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor, pihak Kepolisian tidak bergerak untuk menanganinya.

Kabupaten Mukomuko terkenal dengan potensi komoditas tambangnya yang melimpah, yaitu pertambangan bahan tambang batuan atau lebih dikenal dengan pasir dan batu (sirtu). Di Kabupaten Mukomuko, pada tahun 2020 ada sebanyak 36 lokasi pertambangan batuan sirtu, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 47 lokasi pertambangan.

Kasus pertambangan batuan tanpa izin akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar. Dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Sebab banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan batuan tersebut. Pihak kepolisian juga tidak menutup mata akan kondisi ketergantungan hidup masyarakat, karena hal itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Sesungguhnya hanya sisi kemanusiaan saja yang dilakukan terhadap penambang liar.

Kendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kepolisian yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mukomuko, diantaranya adalah :⁶

1. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu Di kantor Kepolisian Resort Mukomuko
Dalam hal ini, kuantitas yang dimaksud adalah jumlah anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resort Mojokerto terdapat 7 (tujuh) orang anggota penyidik dan tidak seimbang dengan kasus pertambangan batuan tanpa izin yang terjadi di 36 lokasi. Kuantitas dan kualitas personil penyidik dalam di unit tindak pidana tertentu (tipiter) yang belum memadai tersebut bisa menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap kasus pertambangan batuan tanpa izin. Meskipun pihak penyidik memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), tetapi apabila penyidiknya sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang lingkungan hidup juga akan berdampak pada penentuan pidana terhadap tersangka tindak pidana pertambangan batuan itu.
2. Oknum Kepolisian yang Bekerjasama
Penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Walaupun begitu, Penegak hukum dapat menjadi hambatan terhadap tegaknya hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih adanya oknum-oknum penegak hukum yang berusaha menguntungkan dirinya sendiri, walaupun harus melanggar hukum yang seharusnya ia tegakkan. Terkait dengan masalah

⁶ Hasil wawancara dengan Agus, anggota subdit 2 tipiter Polda Bengkulu.

penambangan timah ilegal ini, oknum penegak hukum tersebut bisa saja menjadi “deking” dilakukannya penambangan timah ilegal. Karena tidak jarang, ketika dilakukan penertiban, lokasi penertiban tersebut sudah kosong, karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Sehingga timbullah kecurigaan bahwa ada oknum penegak hukum yang membantu para penambang timah ilegal tersebut dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penertiban yang akan dilakukan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Provinsi Bengkulu merupakan suatu provinsi yang memiliki wilayah yang luas dan belum berkembang. Provinsi yang mempunyai 10 Kabupaten/Kota ini bahkan memiliki daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau karena susah akses untuk menuju ke daerah tersebut. Dengan sulitnya akses untuk menuju ke daerah-daerah tersebut, maka para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik, kesulitan untuk melakukan penertiban dan penangkapan terhadap pelaku penambangan timah ilegal ini. Oleh karena itu, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai di Provinsi ini pun menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum pidana.

4. Faktor Masyarakat

Ketika diadakan penertiban secara besar-besaran oleh penegak hukum, tak jarang menimbulkan masalah lagi, yaitu tidak terimanya masyarakat akan penertiban tersebut. Bahkan tak jarang setelah dilakukan penertiban, massa berkumpul untuk melakukan demo menyatakan tidak terima dengan penertiban yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan, ketika dilakukan penertiban, maka masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya, sehingga kemudian muncullah masalah sosial lainnya.

5. Faktor Kebudayaan

Pertambangan di Provinsi Bengkulu ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang, berpuluh ataupun beratus tahun yang lalu, sehingga masyarakat Bengkulu sudah menjadikan pertambangan timah sebagai suatu kebiasaan yang tidak dapat dirubah lagi sehingga menjadi sebuah budaya di masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan penambangan tanpa izin. Ketika pada masa-masa sebelumnya, melakukan penambangan timah tanpa izin sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat, maka masyarakat akan terus mempunyai pemikiran seperti itu. Itulah yang menyebabkan kebudayaan juga menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penambangan ilegal di Bengkulu.

KESIMPULAN

Dalam penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal di Mukomuko, Kepolisian Polda Bengkulu telah menjalankan tiga tahapan proses penanganan, yaitu sosialisasi, pencegahan, dan penindakan. Selain razia dan penertiban berkala, upaya penegakan hukum juga dilakukan melalui kegiatan rutin dan operasi PETI. Hambatan yang dihadapi mencakup kuantitas dan kualitas anggota penyidik yang belum memadai, kerjasama oknum kepolisian, sarana dan prasarana, reaksi masyarakat, serta faktor kebudayaan lokal di Kepolisian Resort Mukomuko. Untuk mengatasi hambatan tersebut, disarankan untuk meningkatkan pelatihan bagi anggota penyidik, memperkuat kerjasama antarinstansi terkait, memperbaiki sarana dan prasarana yang diperlukan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif penambangan ilegal, dan mengintegrasikan kebijakan yang menghormati kearifan lokal dalam penegakan hukum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Muhammad Agus Fajar Syaefudin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1 | Mei 2020, hlm. 109.
2. Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
3. Junaid, *Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan*, Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 11. No.1, Januari – April 2022, hlm. 61
4. Muhammad Agus Fajar Syaefudin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1 | Mei 2020, hlm. 109.
5. Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
6. Bedah Hukum, *Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, <https://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022.
7. Hasil wawancara dengan Agus, anggota subdit 2 tipiter Polda Bengkulu.